

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdullah Rozali, 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta : Raja garfindo.
- Ali Chaidir, 1979. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria*. Bandung : Bina Cipta.
- Arief Sidharta Bernard, 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung, FH Unika Parahyangan.
- Arifin Zainal Hoesein, 2009. *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undang*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'at, M. Ali, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie Jimly, 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Atmosudirdjo Prajudi, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bintaro R., 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Brouwer J.G. dan Schilder, 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen Ars Aequilibr.
- Budiardjo Miriam, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan : Bitra Indonesia.
- Effendi Paulus Lotulung, 1999/2000. *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (judicial review)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Departemen hukum Perundang-undangan RI.
- Effendi Lutfi, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang : Bayumedia Publishing.

- Ganjong, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Haar Bzn Ter, 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hadjon Philipus M., dkk, 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hadjon Philipus M., dkk., 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Hadjon Philipus M., 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan*, Yogyakarta : Rajawali Press.
- Haris Syamsudin, et. Al. 1999. *Indonesia di Amabang Perpecahan*. Jakarta : Erlangga.
- Harjowidigo Roseno, 2004. *Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia*. Jakara : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Harsono Boedi, 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- HAW Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarto Hetifa Sj, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung : Yayasan Obor Indonesia.
- HR. Mahmutarom, 2001. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Huda Ni'matul dan R. Nazriyah, 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung : Nusa Media.
- Ilmar Aminuddin, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Kencana.
- Indrati Soeprapto Maria Farida, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Kanisius.

- Indrati Soeprapto Maria Farida, 2010. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Harapan.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, 1990. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil C.S.T. dan S.T.Kansil Critine, 2001. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kelsen Hans, 2010. *Teori hukum murni-dasar-dasar ilmu hukum normative” terjemahan The fure of teory*, (Barkely University of California press, 1978). Bandung : Nusa Media.
- Lili Rasjidi dan Thania Ira Rasjidi, 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif Cet. Ke-1*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Mahfud Moh. MD, 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.
- Mahfud Moh. MD, 2006. *Membangun Potik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Manan Bagir, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill Co.
- Manan Bagir, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Fakultas Hukum Unpad.
- Marbun SF., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Marzuki Peter Mahmud, 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo Sudikno, 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Liberty.

- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muin Fahmal H. A., 2008. *Peran asas-asas Umum Pemerintahan yang layak dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, Cet. Ke-2, 2008, Yogyakarta : Total Media.
- Mulyosudarmo Suwoto, 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- NR Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- NR Ridwan, 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- NR Ridwan, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Parlindungan A.P., 1991. *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Pound Roscoe, 1972. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : Bharata.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Prodjodikoro Wirjono, 1989. *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Purbacaraka Purnadi dan Ali M Chidir, 1990. *Disiplin Hukum*. Cet. ke-IV, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Sajipto, 2006. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Buku Kompas
- Rahardjo Satjipto, 1996. *Ilmu Hukum*. Cet IV. Bandung : PT Citra Aditya.
- Rasjidi Lili dan Shidarta B. Arief, 1987. *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung : Rosda Karya.
- Riawan, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rifai Ahmad, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

- Riwu Kaho Josep, 2000. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rositawati Dian, 2005. *Judicial Review, (Bahan Materi). Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005 tentang Mekanisme Judicial Review*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Rosodjatmiko P., 1982. *Pemerintahan di Daerah Dan Pelaksanaanya*. Bandung : Tarsito.
- Dede Rosyada Dkk, 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- S. Attamimi A. Hamid, 1993. *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*. Jakarta : Fakultas Hukum UI.
- Sadjjono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Salim, 2009. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Makasar : Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono, 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soeroso R., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Stroink F.A.M. dalam Abdul Rasyid, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wignjodipuro Surojo, 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Yuliandri, 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 tanggal 05 April 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017.

C. Jurnal, Tesis dan Disertasi

Hadjon Philipus M., 1997. *Tentang Wewenang*. Yuridika No. 5 dan 6, September-Desember.

Hamid Abdul, 2012. *Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dengan Teknik Penyusunan Peraturan perundang-Undangan*. Tesis. Universitas Bengkulu.

Irwansyah, 2011. *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Implikasi Yuridis Atas Penolakannya Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

Kantaprawira Rusadi, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Kuncoro Edy, 2010. *Peralihan Tanah Bengkok dan Akibat Hukumnya (studi Kasus Putusan PN Boyolalinomor 51/Pdt.G/1999/PN.Bi)*. Tesis. Universitas Diponegoro.

Kusuma Putra Candra, Nur Pratiwi Ratih, suwondo, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik

- Ramelan Eman, 1999. *Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Yuridika Volume 14, Maret-April.
- S. Attamimi A. Hamid, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Saiful Ahmad Ahluddin, 2011. *Prolegnas Sebagai Langkah Awal Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra Volume IV, Nomor 2, November 2011, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soemantri Sri, 2001. *UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*. Vol. 1, No. 4, Sept-Nov : Jurnal Demokrasi dan HAM.
- Syafrudin Ateng, 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan.